

Bab 3. Permasalahan dan Isu

Sektor perkebunan memegang peran kunci dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Timur, dalam pembangunan sektor perkebunan dihadapkan pada permasalahan dan isu-isu yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal serta global. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi didalam proses pembangunan perkebunan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari permasalahan tersebut akan disusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perkebunan.

Sektor perkebunan mempunyai peranan cukup strategis dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur diluar sektor pertambangan baik migas maupun non migas. Perkembangan perkebunan di Kalimantan Timur terus memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian daerah dan masyarakat lokal. Tetapi pada kenyataannya, sektor perkebunan masih mempunyai beberapa permasalahan, antara lain budidaya tanaman didominasi oleh komoditas kelapa sawit, lambatnya realisasi pembangunan perkebunan oleh perusahaan perkebunan besar swasta, konflik lahan, perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak clear dan clean, tanaman perkebunan masih diusahakan secara monokultur, produktivitas tanaman perkebunan masih rendah, mutu produksi perkebunan yang masih rendah karena kurang didukung oleh usaha pemasaran dan pengolahan serta belum optimalnya kelembagaan petani.

Berbagai permasalahan diatas menyebabkan **Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal mewujudkan peran strategisnya dalam pembangunan ekonomi, ekologi dan sosial-budaya untuk mensejahterakan masyarakat**". Permasalahan pokok tersebut muncul karena adanya berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

Gambar 3.1
Hambatan dan Permasalahan yang Dihadapi



1. Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan

Dilihat dari berbagai aspek seperti potensi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan pembangunan, potensi pasar domestik dan internasional produk-produk perkebunan, Kalimantan Timur memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perkebunan.

Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2018, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 394 ijin seluas 3.089.234 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 338 IUP dengan luas 2.594.626 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2017 adalah 1.192.342 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya. Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 1,2 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.

Tabel 3.1
Pemanfaatan Lahan dan Realisasi Tanam Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	PEMANFAATAN LAHAN			Realisasi Tanam Kebun Inti (ha)
		Luas yang Telah Dibebeani Ijin Perkebunan (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	
1	2	3	4	5	6
1	Berau	314,581	207,314	123,604	92,650
2	Kutai Timur	791,203	749,947	357,568	352,882
3	Kutai Kertanegara	679,578	668,980	266,478	189,657
4	Kutai Barat	549,974	419,488	163,331	121,226
5	Mahakam Ulu	269,723	178,076	35,047	19,862
6	Penajam Paser Utara	136,031	136,726	31,589	30,406
7	Paser	348,144	234,094	134,899	86,714
8	Samarinda	-	-	-	-
9	Balikpapan	-	-	-	-
10	Bontang	-	-	-	20
Jumlah		3,089,234	2,594,626	1,112,515	893,417

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2018)

Dari data diatas kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidak efisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak clear dan cleannya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek landbanking yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini meyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan "**Lambatnya Realisasi Pembangunan Perkebunan**" oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :

- Tidak clear dan clean nya perijinan di sektor perkebunan;
- Pengawasan dan penegakan hukum terdapat pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU
- Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan tidak dicabut;
- Adanya ijin perkebunan pada lokasi lokasi yang tidak sesuai;

- e. Upaya pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun kelapa sawit masa pembangunan dan operasional tidak semuanya dilakukan penilaian;
- f. Konflik lahan akibat terjadi tumpang tindih masalah perizinan usaha perkebunan;
- g. Kebijakan pembangunan perkebunan dalam hal pemberian ijin antara Provinsi dan Kab belum selaras; dan
- h. Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi dan pengawasan yang modern berbasis IT dan spasial.

2. Rendahnya produktivitas kebun rakyat

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh subsektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017, Sektor Perkebunan mendominasi sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 56,46% (4,49% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Rincian produktivitas komoditi perkebunan rakyat tahun 2013-2017 pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Produktivitas Perkebunan Rakyat Tahun 2013-2017

Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)					Potensi berdasarkan PDKP
	2013	2014	2015	2016	2017	
Kelapa Sawit	15.23	14.76	15.39	14.47	15.72	20.00
Karet	1.38	1.38	1.38	1.33	1.34	1.67
Kakao	0.904	0.707	0.765	0.552	0.501	1.00
Kelapa Dalam	0.654	0.564	0.684	0.634	0.802	1.50
Lada	1.046	1.034	1.061	0.724	0.985	1.20
Kopi	0.286	0.229	0.215	0.243	0.256	1.30

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk di tingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Permasalahan "**Rendahnya produktivitas kebun rakyat**" dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan permodalan;
- b. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai;

- c. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi;
- d. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS ;
- e. Ketersediaan bibit yang berkualitas kurang;
- f. Penggunaan bibit yang illegitim;
- g. Praktek budidaya yang tidak tepat; dan
- h. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.

3. Pengembangan komoditas perkebunan non sawit terhambat

Luas areal komoditi non sawit di Provinsi Kalimantan Timur seluas 162.899 Ha pada tahun 2016 dan 159.725 Ha pada tahun 2017. Berdasarkan data tersebut, areal komoditi non sawit mengalami penurunan hingga mencapai 1,95%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat petani terhadap komoditi non sawit, terbatasnya lahan pengembangan, ketersediaan benih, dan sulitnya pemasaran.

Permasalahan "**Pengembangan komoditas perkebunan non sawit terhambat**" dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya harga komoditas non sawit;
- b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit;
- c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya; dan
- d. Minat pasar terhadap komoditas non sawit masih rendah.

4. Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kaltim, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-

desa yang menjual hasil pertaniannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Permasalahan Pemasaran dan Lambatnya pembangunan industri Hilir Komoditas Perkebunan” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern;
- b. Kurangnya pelatihan dan prakter mengolah mandiri oleh para pekebun;
- c. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah masih menggunakan alat dan mesin manual/sederhana;
- d. Kurangnya Sosialisasi, Promosi dan pengenalannya komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/Kota;
- e. Terbatasnya akses Informasi tentang pasar/harga produk komoditi perkebunan;
- f. Keterbatasan infrastruktur dasar untuk menarik investasi;
- g. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;
- h. Tataniaga produk perkebunan yang sangat rumit/panjang; dan

- i. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani.

5. **Kampanye negatif dan tuntutan isu lingkungan di sektor perkebunan**

Pemanasan global (*global warming*), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik seara lokal, regional dan nasioan dan global.

Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi.

Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan "**Kampanye negatif dan tuntutan isu lingkungan di sektor perkebunan**" dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Perang dagang antar negara;
- b. Tidak dipahami usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dalam upaya membangun kebun yang berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang untuk pembangunan kebun sawit;
- d. Pembangunan kebun rakyat yang berada di kawasan hutan;
- e. Supply Chain produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik;
- f. Praktek landbanking;
- g. Pengawasan dan penerapan Sanksi belum dilakukan oleh penerbit izin usaha;
- h. Belum selarasnya kebijakan pembangunan Perkebunan di tingkat Provinsi dan Praktek perijinan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten;
- i. Komitmen perusahaan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan masih beragam; dan
- j. Pemanfaatan biomassa untuk pengembangan energi baru terbarukan belum optimal.

6. **Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah**

Informasi dan data yang akurat merupakan suatu keharusan yang diperlukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Demikian pula dalam pembangunan



Perkebunan membutuhkan sistem pengelolaan data yang akurat untuk digunakan pada proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi pembangunan perkebunan. Pengelolaan data ini tidak hanya cukup berisi data tabular variabel kuantitatif dan waktu, namun harus dilengkapi dengan aspek spasial yang dapat menunjukkan lokasi dan ruang dimana kebun tersebut akan dan telah dibangun.

Padahal, pelaporan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengetahui kinerja Dinas Perkebunan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan. Apabila data-data yang disampaikan tidak akurat, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang salah dan tentu saja akan membawa dampak buruk bagi Dinas Perkebunan.

Selain itu, aspek spasial diperlukan untuk melengkapi dan memverifikasi data dan informasi tabular. Selama ini pemanfaatan data spasial di Dinas Perkebunan terbatas pada saat pemberian pertimbangan teknis ijin yang akan diberikan namun pada saat evaluasi, pengawasan dan pembinaan aspek spasial belum banyak di dayagunakan. Untuk mengatasi tersebut diperlukan pengumpulan dan verifikasi dan pengolahan data perkebunan yang baik serta dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data detail seperti lokasi, luasan, produksi, rencana penanaman, sistem pengangkutan sampai pada data nilai ekonomi komoditas perkebunan.

Pada tahun 2018 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan sistem pelaporan dan pelayanan secara online, yaitu : Web Gis Perkebunan, Sistem Informasi Pelaporan Perkebunan (SIP-Kebun) dan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS) Online. Melalui sistem informasi tersebut, diharapkan akan menjadi jawaban atas semua permasalahan mengenai data dan informasi yang disediakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini belum terkelola dengan baik.

Akar permasalahan **"Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah"** dipicu oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;
- b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah;
- c. Sistem pelaporan belum ada referensi secara spasial;
- d. Kurangnya dukungan SDM dalam pengelolaan data;
- e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik; dan
- f. Infrastruktur pengelolaan data di Kabupaten/Kota masih terbatas.

7. Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan pekebun

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Penataan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing sub sektor perkebunan ditentukan oleh kerjasama sinergis (dan pembagian kerja) antar pengampu kepentingan, yaitu pemerintah atau masyarakat politik secara umum (*political society*), dunia usaha atau masyarakat bisnis (*business society*), dan masyarakat madani (*civil society*).

Peran pemerintah sangat strategis terutama dalam menyediakan infrastruktur dan perangkat regulasi agar pelaksanaan pengembangan sub sektor perkebunan benar-benar berjalan secara baik dan efisien. Kondisi ini sangat diperlukan, apalagi dalam menghadapi krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Kelembagaan yang ada masih belum mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertangguh struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Kelembagaan petani masih lemah, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Dengan analisis permasalahan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **"masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan pekebun"** dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya regenerasi SDM di sektor Perkebunan;
- b. Bentuk organisasi yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota bergabung dengan sub sektor lain;
- c. Cepatnya mutasi dan rotasi pegawai pada Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota;
- d. Masih lemahnya keberpihakan Lembaga keuangan untuk pengembangan komoditas Perkebunan;
- e. Rantai pemasaran komoditas Perkebunan masih Panjang dan tidak efisien;
- f. Pengembangan iptek yang dibutuhkan oleh dunia usaha belum optimal; dan
- g. Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana prasarana.

Dari analisa diatas, permasalahan yang dihadapi Dinas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 - 2023

Permasalahan Pokok Pembangunan perkebunan belum mewujudkan peran strategisnya secara ekonomis, ekologis dan sosial-budaya		
No	Masalah	Akar Masalah
1	Lambatnya realisasi pembangunan perkebunan yang menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan pada pola ruang perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak clear dan clean nya perijinan di sektor perkebunan; b. Pengawasan dan penegakan hukum terdapat pelanggaran kewajiban yang tertuang dalam IUP dan HGU c. Ijin Lokasi, IUP dan HGU yang tidak diusahakan tidak dicabut; d. Adanya ijin perkebunan pada lokasi lokasi yang tidak sesuai; e. Upaya pengawasan melalui sistem Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) kebun kelapa sawit masa pembangunan dan operasional tidak semuanya dilakukan penilaian; f. Konflik lahan akibat terjadi tumpang tindih masalah perizinan usaha perkebunan; g. Kebijakan pembangunan perkebunan dalam hal pemberian ijin antara Provinsi dan Kab belum selaras; dan h. Belum seluruh Kabupaten/Kota menerapkan sistem evaluasi dan pengawasan yang modern berbasis IT dan spasial.
2	Rendahnya produktivitas kebun rakyat	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan permodalan; b. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai; c. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi; d. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS ;

Permasalahan Pokok Pembangunan perkebunan belum mewujudkan peran strategisnya secara ekonomis, ekologis dan sosial-budaya		
No	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> e. Ketersediaan bibit yang berkualitas kurang; f. Penggunaan bibit yang illegitim; g. Praktek budidaya yang tidak tepat; dan h. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun.
3	Pengembangan komoditas perkebunan non sawit terhambat	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya harga komoditas non sawit; b. Kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit; c. Alih fungsi lahan ke komoditi lainnya; dan d. Minat pasar terhadap komoditas non sawit masih rendah.
4	Permasalahan Pemasaran dan Lambatnya pembangunan industri Hilir Komoditas Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern; b. Kurangnya pelatihan dan prakter mengolah mandiri oleh para pekebun; c. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil perkebunan sehingga dalam mengolah masih menggunakan alat dan mesin manual/sederhana; d. Kurangnya Sosialisasi, Promosi dan pengenالannya komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/Kota; e. Terbatasnya akses Informasi tentang pasar/harga produk komoditi perkebunan; f. Keterbatasan infrastruktur dasar untuk menarik investasi; g. Terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, maupun antara hulu dan hilir yang sering menimbulkan konflik;

Permasalahan Pokok Pembangunan perkebunan belum mewujudkan peran strategisnya secara ekonomis, ekologis dan sosial-budaya		
No	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> h. Tataniaga produk perkebunan yang sangat rumit/panjang; dan i. Tidak adanya jaminan harga yang adil bagi petani.
5	Kampanye negatif dan tuntutan isu lingkungan di sektor perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perang dagang antar negara; b. Tidak dipahami usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dalam upaya membangun kebun yang berkelanjutan; c. Belum optimalnya pemanfaatan lahan lahan kritis di pola ruang perkebunan yang untuk pembangunan kebun sawit; d. Pembangunan kebun rakyat yang berada di kawasan hutan; e. Supply Chain produksi kelapa sawit masih belum tertata dengan baik; f. Praktek landbanking; g. Pengawasan dan penerapan Sanksi belum dilakukan oleh penerbit izin usaha; dan h. Belum selarasnya kebijakan pembangunan Perkebunan di tingkat Provinsi dan Praktek perijinan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten; i. Komitmen perusahaan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan masih beragam; dan j. Pemanfaatan biomassa untuk pengembangan energi baru terbarukan belum optimal.
6	Pengelolaan Data sektor Perkebunan masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pelayanan dan pelaporan yang masih manual, melalui prosedur yang panjang dan tidak update;

Permasalahan Pokok Pembangunan perkebunan belum mewujudkan peran strategisnya secara ekonomis, ekologis dan sosial-budaya		
No	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> b. Tingkat kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menyampaikan laporan masih rendah; c. Sistem pelaporan belum ada referensi secara spasial; d. Kurangnya dukungan SDM dalam pengelolaan data; e. Perkebunan rakyat belum terdata dengan baik; dan f. Infrastruktur pengelolaan data di Kabupaten/Kota masih terbatas.
7	Masih rendahnya kapasitas institusi dan kelembagaan pekebun	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya regenerasi SDM di sektor Perkebunan; b. Bentuk organisasi yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota bergabung dengan sub sektor lain; c. Cepatnya mutasi dan rotasi pegawai pada Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota; d. Masih lemahnya keberpihakan Lembaga keuangan untuk pengembangan komoditas Perkebunan; e. Rantai pemasaran komoditas Perkebunan masih Panjang dan tidak efisien; f. Pengembangan iptek yang dibutuhkan oleh dunia usaha belum optimal; dan g. Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana prasarana.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2019-2023, maka Visi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah :

"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"

Untuk mewujudkan visi maka diperlukan serangkaian misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dengan melihat fokus dan peta permasalahan dan isu strategis serta amanat misi dalam RPJPD dan RPJMN maka arahan misi pembangunan 2019-2023 adalah :

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Dari visi dan misi RPJMD di atas tampak jelas bahwa Dinas Perkebunan sekurang-kurangnya berhubungan dengan misi kedua dan keempat. Sesuai RPJMD periode 2019-2023 sektor perkebunan akan memainkan peran yang penting, secara langsung akan mengemban amanah untuk mensukseskan ***misi (2) Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan*** dan secara tidak langsung mendukung pencapaian misi (4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk mensukseskan misi ke 2 sektor perkebunan akan berperan penting pada perubahan pembentukan struktur ekonomi yang berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui demikian juga mengurangi Kesenjangan pembangunan antar daerah di Kalimantan Timur melalui penciptaan ekonomi dan pembukaan akses infrastruktur perkebunan, menyediakan produk komoditas-komoditas unggulan sebagai basis perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada masa mendatang, menciptakan sistem ekonomi partisipatif dengan meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengembangkan usaha perkebunan. Demikian pula sektor

perkebunan memiliki potensi yang besar untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemanfaatan biomassa yang berlimpah.

Sedangkan untuk mendukung secara tidak langsung dalam mensukseskan misi ke 4 sektor perkebunan akan berperan dalam melalui upaya pembangunan perkebunan yang menerapkan prinsip berkelanjutan secara ekonomi, produksi, sosial dan lingkungan. Secara aktif disiplin dalam pemanfaatan ruang dan meningkatkan efiseiensi pemanfaatan ruang melauai upaya penataan dan penertiban perijinan sektor perkebunan.

Dengan pengelolaan yang maksimal terhadap hasil (produk) perkebunan akan memberikan daya dukung dalam meningkatkan daya saing produk yang berimbas pada perekonomian daerah. Dengan disiplin yang tinggi agar perkebunan juga dikuasai oleh masyarakat maka keberhasilan pembangunan perkebunan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam misi 2 RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Dengan pemanfaatan yang optimal, baik pemanfaatan sebagai bahan baku energi terbarukan maupun sebagai produk mentah dengan tanpa meninggalkan keseimbangan lingkungan akan mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur.

Selanjutnya, dengan hasil nyata bahwa seluruh produk utama, turunan dan ikutannya dari perkebunan dapat dimanfaatkan maka kekhawatiran sementara pihak-pihak tertentu yang selalu menyuarakan bahwa perkebunan (khususnya kelapa sawit) berdampak buruk pada lingkungan tidak berdasar.

3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan

Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI adalah lambatnya penyelesaian status asset pusat di daerah, optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut maka tugas dan fungsi pemerintahan harus lebih berdaya dan berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan sehingga ditetapkan menjadi

komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari 127 jenis tanaman tersebut prioritas pengembangan ditujukan bagi komoditas unggulan nasional sebanyak 15 jenis. Dinas Perkebunan Kalimantan Timur memprioritaskan pengembangan 5 dari 15 jenis komoditi unggulan nasional antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao dan lada.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2015-2019, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "***Menjadi direktorat jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun dan memperkuat fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan***".

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menetapkan 7 misi pembangunan nasional tahun 2015-2019 diantaranya adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Mengacu pada misi pembangunan nasional tahun 2015-2019, Kementerian pertanian menetapkan misi kementerian pertanian tahun 2015-2019 diantaranya :

- a. *Mewujudkan kedaulatan pangan;*
- b. *Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan;*
- c. *Mewujudkan kesejahteraan petani; dan*
- d. *Mewujudkan reformasi birokrasi.*

Untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam misi pembangunan perkebunan 2015-2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi tanaman Perkebunan secara berkelanjutan;
2. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan;
3. Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil Perkebunan secara berkelanjutan;
4. Menyediakan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha Perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik Perkebunan;
5. Mewujudkan sistem perlindungan Perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan;
6. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman Perkebunan dengan pendekatan Kawasan;
7. Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;
8. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman Perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan;
9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas Perkebunan; dan
10. Mendorong pengembangan pemasaran produk Perkebunan di tataran domestic dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi wilayah dan daerah, dengan berlandaskan memiliki wilayah dan daerah yang sama maka dalam penyusunan renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Realisasi Pemakaian Lahan untuk pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Realisasi Pemakaian Lahan
Sektor Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	RTRW Peruntukan Perkebunan (Ha)	Realisasi pemakaian lahan hingga 2018 (Ha)
1	2	3	4
1	Berau	405.645	137.661
2	Kutai Timur	881.661	473.316
3	Kutai Kertanegara	715.397	253.013
4	Kutai Barat	487.288	190.451
5	Mahakam Ulu	275.725	22.721
6	Penajam Paser Utara	80.758	65.995
7	Paser	398.945	200.258
8	Samarinda	22.186	2.757
9	Balikpapan	880	5.730
10	Bontang	1.076	161
	Jumlah	3.269.561	1.352.063

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perkebunan ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perkebunan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang.

Telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap pelayanan PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Peruntukan Pengembangan Budidaya Perkebunan	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan kritis	Kapasitas kelembagaan masyarakat pada wilayah pengembangan perkebunan belum memadai baik kualitas maupun kuantitasnya	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi dan fasilitasi untuk pengembangan komoditi perkebunan
2.	Konsesi perusahaan perkebunan besar masuk dalam kawasan yang diakui sebagai hak ulayat	Terjadinya konflik pemanfaatan lahan di beberapa perusahaan besar swasta/negara	Belum adanya kesepahaman dengan masyarakat sekitar konsesi perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam menetapkan kawasan budidaya perkebunan besar	Adanya komitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi, turut serta secara aktif mendampingi dan memotivasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di Kabupaten

Dengan melihat tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa dalam pengembangan pengelolaan perkebunan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur masih memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dan benar antara pemerintah daerah, masyarakat Kalimantan Timur, dan stakeholder. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dan pengelolaan struktur ruang wilayah untuk perkebunan masih terjadi tumpang tindih dan penegakkan hukum perijinan lahan belum ditegakkan serta masih belum sepenuhnya dipahami oleh semua stakeholder Kalimantan Timur.

Telaah Pola Ruang Wilayah

Pemanfaatan ruang jangka menengah hanya didasarkan pada Pola Ruang berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya, apabila dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, rancangan program beserta target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Terhadap
Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kawasan budidaya Non Kehutanan (KBNK)	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dikeluarkan ijin lokasi pengembangan budidaya tanaman perkebunan oleh Bupati/Walikota • Tumpang tindih perkebunan, pertambangan dan lainnya • Pola kemitraan pembangunan lahan masyarakat dengan Perusahaan besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan status legalitas perijinan melalui pembinaan usaha perkebunan • Untuk peningkatan fungsi pengembangan budidaya tanaman perkebunan guna pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi • Peningkatan usaha berbasis pemberdayaan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpengaruh positif karena program yang dialokasikan terkait dengan pelayanan PD sudah sesuai dengan peruntukannya • Memberikan arahan untuk pembangunan perkebunan yang lebih fokus sesuai dengan pola ruang fungsi dalam peruntukannya untuk jangka menengah • Pembinaan dan pendampingan sistem kemitraan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan untuk pembangunan perkebunan sesuai peruntukannya • Pemberdayaan masyarakat disekitar PBS dengan pola revitbun non revitbun sebanyak 20% • Perlu peningkatan kapasitas kelembagaan melalui ketentuan maupun aturan (Permentan, Perda, Pergub) • Menetapkan rencana kebun kemitraan dalam peta ijin lokasi perusahaan
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)	Perkebunan rakyat yang sudah termanfaatkan secara turun temurun banyak yang masuk dalam KBK	Perencanaan pola ruang dengan mengacu pada satu peta dasar yang sama (<i>one map one data</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tertatanya pembangunan perkebunan sesuai dengan peruntukannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan alih fungsi lahan eksisting kearah APL (Areal Penggunaan Lain)

Dengan melihat tabel diatas (Tabel 3.5 dan 3.6) melalui rencana struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai pola wilayah yang berorientasi pada pengkayaan Sumberdaya Alam. Melihat pola ruang saat ini, pola ruang memberikan dukungan penuh pada pengembangan areal tanaman. Dengan program pemanfaatan ruang yang memberikan dukungan penuh dalam pengembangan kaltim green. Dengan melihat tabel 3.5 terlihat pada struktur ruang wilayah pada pengembangan kawasan budidaya perkebunan rakyat dapat terlihat, mengindikasikan peluang dan kesempatan yang besar dalam mengembangkan SDA semaksimal dan seoptimal mungkin dalam mendukung perekonomian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan pemberdayaan masyarakat Kalimantan Timur.

Sehingga dengan pola ruang sesuai dengan tabel 3.6 diatas, diharapkan Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan bekerja sama dengan Instansi terkait dan *stakeholder* dapat mengembangkan dan membangun Kaltim (*green economy*) yang terpadu dan berkelanjutan.

3.4.2 Telaah KLHS Provinsi Kalimantan Timur

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan PD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Hasil analisis terhadap permasalahan dari telaahan dokumen KLHS Provinsi Kalimantan Timur di PD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disarikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Disbun Prov. Kaltim berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata ruang wilayah prov. kaltim yang belum selesai sampai saat ini • Terjadinya konflik kepentingan penguasaan lahan pada daerah pengembangan perkebunan • Adanya kabupaten dalam pemberian perijinan untuk izin usaha perkebunan tanpa rekomendasi dari Gubernur • Data base peta dasar, peta tematik dan potensi pengembangan perkebunan belum lengkap dan akurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan pola ruang mengalami proses waktu yang cukup lama karena banyaknya sumber peta. • Inkonsistensi pengambil kebijakan oleh stekholder dalam pemberian izin usaha • Ketersediaan data dan informasi pendukung belum lengkap sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam pemberian izin • Kurang tersedianya peta citra landsat resolusi tinggi sebagai peta dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan Prov. Kaltim mendorong untuk mempercepat proses review data tata ruang provinsi • Dinas perkebunan prov. kaltim dalam pembangunan perkebunan akan mensosialisasikan sesuai dengan peraturan menteri pertanian No. 98 tahun 2013 • Tersedianya <i>one map, one police</i> yang dikeluarkan oleh badan informasi geospasial (BIG)
2.	Kinerja layanan jasa ekosistem dari kawasan bernilai konservasi tinggi terhadap usaha perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penetapan kawasan konservasi bernilai tinggi didalam konsesi usaha perkebunan oleh kepala daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum semua jasa usaha perkebunan memahami keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi diperkebunan 	Bimbingan teknis serta menetapkan mengenai keberadaan kawasan bernilai konservasi tinggi di perkebunan

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, terlihat jelas bahwa daya dukung dan daya pengembangan perkebunan dalam masyarakat Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur masih kurang.

Selain itu, ketegasan dan penegakkan hukum dalam hal pemberian izin ataupun produk hukum lainnya belum disosialisasikan dan ditegakkan secara jelas. Sehingga pengembangan dan pengelolaan sektor perkebunan belum optimal.

Tabel 3.8

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Kaltim dan Perangkat Daerah
 Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan PD
(1)	(2)	(3)	(4)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pengembangan perkebunan 2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem 4. Efisiensi pemanfaatan lahan 5. Tingkat kerentanan dalam menghadapi perubahan iklim 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah kebijakan rencana dan program yang menjadi focus dalam KLHS dalam pengembangan perkebunan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi untuk tingkat provinsi dilihat dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat di sekitar perkebunan • Pemantapan lahan budidaya perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat melalui usaha budidaya • Peningkatan kapasitas kelembagaan, hukum melalui Permentan, Perda / Pergub • Revitalisasi pembangunan perkebunan secara berkesinambungan • Perlindungan dan konservasi pemanfaatan lahan-lahan kritis untuk pembangunan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemanfaatan daya dukung lahan kritis untuk pengembangan perkebunan berbasis pemberdayaan masyarakat • Perencanaan makro untuk pembangunan perkebunan • Konservasi untuk HCV pada perkebunan besar untuk perlindungan keanekaragaman hayati • Peningkatan kualitas perencanaan • Peningkatan usaha budidaya perkebunan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan sesuai dengan kearifan lokal
Sisitem budidaya perkebunan yang rentan terhadap perubahan iklim	Memperhatikan isu-isu global tentang pembangunan perkebunan yang berkelanjutan berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan	Optimalisasi penggunaan lahan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian	Konservasi sumberdaya hayati dan penurunan emisi GRK

Berdasarkan tabel diatas (tabel 3.8) dapat terlihat aspek – aspek kajian dalam KLHS, dengan memperhatikan isu-isu strategis dan kondisi wilayah, kebijakan, rencana dan program yang menjadi fokus pengkajian dalam KLHS yaitu dengan pengembangan kawasan perkebunan provinsi yang ditinjau dari aspek kepentingan ekonomi dan lingkungan secara umum. Dalam aspek kajian KLHS ini menandai bahwa pemanfaatan dan peningkatan dalam areal tanaman serta pemeliharannya menjadi landasan dalam pengoptimalan pengelolaan kawasan perkebunan dan kawasan budidaya perkebunan.

Aspek kajian KLHS ini sangat mendukung dalam memberi keseimbangan kegiatan manusia dengan alam. Dengan hal ini, aspek KLHS sangat memberi pengaruh pada kondisi tanam yang akan memengaruhi hasil tanaman/perkebunan. Sehingga secara beruntun akan menimbulkan dampak pada sector-sektor lainnya. Dengan demikian, pemenuhan aspek pada KLHS ini sangat mendukung dalam pengembangan Program Kaltim Hijau (*green economy*).

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur lima tahun ke depan, meliputi :

1. Diperlukan tindakan penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan;
2. Peningkatan produktivitas kebun khususnya kebun swadaya;
3. Meningkatkan upaya kemitaraan antara dengan perusahaan perkebunan dengan penguatan kelembagaan pekebun yang baik;
4. Melakukan sosialisasi untuk mengkapanyekan pembangunan berkebuna di Kalimantan Timur dilakukan secara berkelanjutan baik di tingkat Regional, Nasional dan Global;
5. Memperbaiki sistem pengelolaan data perkebunan dan diseminasinya;
6. Membuka jalur pemasaran komoditas perkebunan hingga ketingkat international; dan
7. Melakukan diversifikasi pengembangan komoditas perkebunan.